REVITALISASI DIENG BELUM USAI, PEMKAB WONOSOBO PASTIKAN NATARU TETAP PADAT PENGUNJUNG

Sumber Gambar:
https://magelangekspres.disway.id/upload/1a63c08814f63d6c5330b05ff0899acf.jpg

Isi Berita:

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES - Revitalisasi kawasan wisata di Dieng masih belum selesai hingga akhir tahun 2023. Proyek strategis nasional tersebut dijamin tak akan menggangu aktivitas wisatawan di musim liburan natal dan tahun baru (nataru) mendatang.

"Sebenarnya ini proyek milik pemerintah pusat. Tapi kami bisa pastikan, Dieng akan tetap ramai meskipun renovasi Dieng masih belum selesai," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto kepada wartawan belum lama ini.

Nurudin mengaku sempat menerima data kunjungan wisatawan ke Dieng terbaru. Ia mengungkapkan, sejauh ini wisata di dataran tinggi Dieng masih terpantau dipadati pengunjung.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo, Agus Wibowo mengungkapkan bahwa prediksi mobilisasi kunjungan akan meningkat hingga sebanyak 1,7 juta orang di musim ini.

"Dieng masih jadi wisata primadona, masih jadi wisata yang paling banyak dikunjungi di Wonosobo. Target kami ya 1,7 juta wisatawan akan datang pada momentum nataru kali ini," ungkap Agus Wibowo kepada Wonosobo Ekspres baru-baru ini.

Agus membenarkan pernyataan Nurudin Ardiyanto, bahwa meskipun proyek di Dieng belum selesai, namun tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisata di Wonosobo, khususnya di wisata kawasan Dieng Plateau.

"Loh bahkan sejak ada pengerjaan di Dieng, ada sejumlah warga berinsiatif buka jasa ojek loh. Jasa ojek untuk wisatawan yang akan menuju ke lokasi wisata di area proyek. Tidak apa-apa, toh sementara, dan bisa menopang ekonomi masyarakat juga kan," terangnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, renovasi Dieng tersebut memakan anggaran sebesar Rp 83.149.893.000 untuk merevitalisasi sejumlah spot wisata di Dieng.

Proyek penataan 6 titik kawasan tersebut dilakukan di 3 spot wisata di komplek Dieng Wetan Kabupaten Wonosobo dan 3 spot wisata di komplek Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara.

Kasubdit. Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Dirjen. Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Kusuma Wardani mengungkapkan, 6 titik yang akan direvitalisasi merupakan proyek perioritas penataan cagar budaya nasional dan penataan wisata wilayah konservasi.

"6 titik revitalisasi Dieng ini, ada sebagian sudah masuk cagar budaya dan juga ada yang sebagian wilayahnya adalah konservasi," katanya belum lama ini.

Diungkapkan, proyek yang dikerjakan oleh PT. Karya Bangun Mandiri Persada itu ditujukan untuk penataan kembali sejumlah spot wisata di dua kabupaten tersebut.

Untuk Kabupaten Wonosobo, revitalisasinya meliputi kawasan Bukit Sikunir seluas 80,7 hektar, lalu kawasan Telaga Warna seluas 63,3 hektar.

Sedangkan untuk Kabupaten Banjarnegara meliputi kawasan Candi Arjuna seluas 79,10 hektar, kemudian kawasan Aswatama yang seluas 53,60 hektar.

Yang terakhir adalah kawasan Wisata Kawah Sikidang yang terbagi berada di antara dua daerah tersebut dengan akumulasi keluasan sekitar 29,37 hektar.

"Karena Dieng ini milik dua daerah, maka kita juga melibatkan pemerintah daerah masing-masing untuk pembangunan revitalisasi Dieng," ucap Kusuma Wardani.

Disampaikan, anggaran revitalisasi dengan nilai kontrak sebesar Rp 83.149.893.000 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023-2024.

Pembagiannya, sebesar Rp 80.799.893.000 dialokasikan untuk kegiatan fisik, sedangkan Rp 2.350.000.000 sisanya untuk pembiayaan supervisi PT. Pola Teknik Konsultan.

"Proyek ini terencana sudah mulai beroperasi sejak 20 Juli 2023 lalu. Target selesai pada 19 Juli 2024. Kira-kira 365 hari atau setahun persis," ungkapnya.

Meski diharapkan proses penataan Dieng akan selesai dengan kurun waktu 1 tahun, Kusuma Wardani mengaku tak dapat janjikan proyeknya bisa tuntas sesuai deadline. Melihat kondisi cuaca di kawasan Dieng belakang ini cukup ekstrim.

Dirinya menilai tantangan pengerjaan proyek di dataran tinggi seperti Dieng begitu besar ketimbang pengerjaan yang dilakukan di daerah bawah.

"Kalau rencana 1 tahun selesai, pengerjaan umumnya kan 3 kali shift. Pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi. Tapi Dieng ini kan luar biasa dinginnya apalagi kalau malam," katanya.

Sebelumnya, dirinya berharap agar pengerjaan bisa dilaksanakan full time. Namun karena kondisi geografis dan cuaca di Dieng jauh berbeda dengan daerah bawah, maka pekerjaannya dilakukan hanya 2 shift yaitu pagi ke sore dan sore ke malam.

"Seharusnya ya ada strategi misal mencari tenaga untuk kerja di shift 3. Tapi sepertinya susah dan kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja saja," jelasnya. (mg7)

Sumber Berita:

1. https://magelangekspres.disway.id/read/658891/revitalisasi-dieng-belum-usai-pemkab-wonosobo-pastikan-nataru-tetap-padat-pengunjung, "Revitalisasi Dieng Belum Usai, Pemkab Wonosobo Pastikan Nataru Tetap Padat Pengunjung", tanggal 11 Desember 2023.
2. https://travel.kompas.com/read/2023/12/09/174000227/wisata-dieng-tetap-buka-saat-libur-nataru-2024-, Wisata Dieng Tetap Buka Saat Libur NAtaru 2024", tanggal 9 Desember 2023.

Catatan :

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.[1]
2. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:[2]
   a) DAK Fisik; dan
   b) DAK Non Fisik

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12
[2] Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

3. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.[3]
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.[4]

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer
[4] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1